



The Impact of Village Head Elections on Social Interaction in Baebunta Village, Baebunta District, North Luwu Regency

Anthon Sattu Pabesak*¹, Apriliani Kusuma Jaya²

* anthonpabesak54@gmail.com

STISIP Veteran Palopo

ABSTRACT

Village head elections (*pilkades*) represent a form of local democracy that involves active community participation. This study aims to examine the impact of village head elections on social interaction within the Baebunta Village community, from both positive and negative perspectives. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants included village head candidates, village officials, community leaders, religious leaders, women leaders, youth leaders, and residents involved in the election process. The findings indicate that the village head election in Baebunta Village produces dual impacts. On the positive side, it increases community political awareness, encourages active participation in the village democratic process, and fosters cooperation between the village government and residents in development activities. However, negative impacts also emerge, including horizontal conflicts, polarization among supporters, a decline in social solidarity, and post-election group exclusivity. Data analysis reveals that community social interaction undergoes dynamic changes, shifting from political tension toward social reconciliation through collective village activities. This study concludes that village head elections function not only as political arenas but also as significant factors shaping patterns of social relationships within the community. Therefore, active involvement of the village government is required to maintain social harmony, along with reconciliation mechanisms to prevent prolonged negative impacts.

Keywords: village head election, social interaction, political participation, social conflict, Baebunta Village.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan proses demokrasi tingkat lokal yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa. Di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, pemilihan kepala desa tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan desa, tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika interaksi sosial masyarakat. Dalam berbagai kasus, proses pemilihan ini dapat menimbulkan polarisasi, konflik horizontal, bahkan perpecahan antarwarga yang sebelumnya hidup rukun. Namun, tidak jarang juga pemilihan kepala desa justru memperkuat solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik desa.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami sejauh mana proses pemilihan kepala desa memberikan dampak terhadap pola interaksi sosial masyarakat di Desa Baebunta. Dengan mengetahui dampaknya, dapat dirumuskan strategi untuk meminimalisir dampak negatif dan memperkuat dampak positif dari proses demokrasi lokal tersebut.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang memberikan ruang partisipasi langsung bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya. Dalam konteks otonomi daerah, Pilkades memiliki peranan strategis, tidak hanya dalam menentukan arah kepemimpinan desa, tetapi juga dalam membentuk struktur sosial dan dinamika hubungan antarwarga desa. Oleh karena itu, Pilkades tidak bisa hanya dipahami sebagai kegiatan politik semata, melainkan sebagai peristiwa sosial yang ber dampak luas terhadap kehidupan masyarakat desa.

Secara umum, proses pilkades melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga kelompok perempuan. Keterlibatan ini mencerminkan besarnya perhatian masyarakat terhadap figur kepala desa yang akan memimpin pembangunan, mengelola anggaran, dan menjaga stabilitas sosial. Namun, dalam praktiknya, Pilkades juga sering menimbulkan perbedaan pandangan, persaingan antarpihak pendukung calon, serta potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Perbedaan pilihan dan loyalitas terhadap calon kepala desa kerap kali memicu ketegangan, baik yang bersifat laten maupun manifest, yang berdampak pada pola interaksi sosial di Masyarakat.

Di Desa Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, fenomena seperti ini tidak terlepas dari perhatian. Desa ini memiliki keragaman budaya dan latar belakang sosial masyarakat yang beragam, yang menjadikannya rentan terhadap gesekan sosial apabila tidak dikelola secara bijak, khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa. Pada beberapa periode Pilkades sebelumnya, tercatat adanya kecenderungan menguatnya polarisasi di tengah masyarakat akibat perbedaan dukungan terhadap calon. Polarisasi ini berpotensi merusak harmoni sosial yang sebelumnya telah terjalin antarwarga. Hubungan kekeluargaan, kekerabatan, bahkan hubungan antar tetangga bisa menjadi renggang akibat perbedaan pilihan politik.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Pilkades juga dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan partisipasi sosial. Dalam proses persiapan dan pelaksanaan Pilkades, muncul berbagai aktivitas sosial seperti diskusi warga, rapat kampanye, kegiatan gotong royong dalam mendukung calon tertentu, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam forum-forum musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Pilkades juga bisa mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif, kerja sama, dan semangat kebersamaan.

Dengan melihat dua sisi yang saling bertolak belakang ini, yaitu potensi konflik sekaligus potensi integrasi sosial, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak Pilkades terhadap interaksi sosial masyarakat. Penelitian ini penting untuk menggambarkan secara objektif bagaimana Pilkades memengaruhi pola hubungan sosial, baik dalam bentuk komunikasi, kerja sama, maupun konflik yang muncul. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika sosial di tingkat desa, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, panitia pemilihan, dan tokoh masyarakat dalam merancang strategi penyelenggaraan Pilkades yang lebih inklusif, partisipatif, dan damai di masa mendatang.

Dengan mengambil studi kasus di Desa Baebunta, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi selama dan pasca proses pemilihan kepala desa, khususnya dalam konteks interaksi sosial masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam kajian ilmu sosial, khususnya sosiologi pedesaan dan ilmu pemerintahan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak Pemilihan Kepala Desa terhadap interaksi sosial masyarakat di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara komprehensif

berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan masyarakat terkait dinamika sosial sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Baebunta dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2025. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses Pilkades, meliputi aparat desa, panitia pemilihan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data primer dan sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai perubahan interaksi sosial masyarakat. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Baebunta tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokrasi lokal, tetapi juga menjadi peristiwa sosial yang secara nyata memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Dampak tersebut terlihat pada perubahan hubungan antarwarga, pola komunikasi, solidaritas sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial desa.

Pada tahap sebelum pelaksanaan Pilkades, masyarakat menunjukkan peningkatan intensitas interaksi sosial yang ditandai dengan maraknya diskusi politik di ruang-ruang sosial, seperti pertemuan informal, pos ronda, dan kegiatan kemasyarakatan. Warga mulai aktif membicarakan figur calon kepala desa, visi-misi, serta harapan terhadap pembangunan desa. Kondisi ini mendorong meningkatnya kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi desa. Interaksi sosial pada fase ini cenderung bersifat aktif dan terbuka, meskipun mulai tampak pembelahan preferensi politik di antara warga.

Selama pelaksanaan Pilkades, interaksi sosial masyarakat mengalami dinamika yang lebih intens. Antusiasme masyarakat tercermin dari tingginya tingkat kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara. Pilkades menjadi momentum kolektif yang mempertemukan warga dari berbagai latar belakang sosial dalam satu ruang demokrasi. Namun, pada fase ini pula mulai terlihat peningkatan ketegangan sosial, terutama antarpendingung calon kepala desa yang berbeda. Perbedaan pilihan politik memunculkan sikap saling curiga, persaingan antar kelompok pendukung, serta komunikasi yang cenderung bersifat emosional.

Pasca pelaksanaan Pilkades, hasil penelitian menunjukkan adanya dua kecenderungan utama dalam interaksi sosial masyarakat. Pertama, munculnya dampak negatif berupa polarisasi sosial yang ditandai dengan renggangnya hubungan antarwarga, berkurangnya intensitas komunikasi, serta menurunnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan sosial desa. Perbedaan pilihan politik masih memengaruhi relasi sosial, bahkan dalam lingkup keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Kedua, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menunjukkan kemampuan adaptasi sosial. Melalui kegiatan kolektif desa, musyawarah, kegiatan keagamaan, dan peran tokoh masyarakat, ketegangan politik secara perlahan mereda. Interaksi sosial yang sempat terganggu mulai pulih, meskipun tidak sepenuhnya kembali seperti sebelum Pilkades. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Baebunta memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk melakukan rekonsiliasi sosial pasca kontestasi politik.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Pilkades merupakan peristiwa politik yang memiliki implikasi sosial yang kompleks. Peningkatan partisipasi politik masyarakat selama Pilkades menunjukkan berkembangnya kesadaran demokrasi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi partisipatoris, di mana keterlibatan aktif warga dalam proses politik menjadi indikator penting dari kualitas demokrasi. Partisipasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui diskusi publik, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, serta kehadiran dalam forum-forum desa.

Namun demikian, meningkatnya partisipasi politik juga membawa konsekuensi berupa kompetisi antarwarga yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Polarisasi yang muncul di Desa Baebunta mencerminkan apa yang dikemukakan dalam teori konflik sosial, bahwa perbedaan kepentingan dan pilihan politik dapat memicu ketegangan dalam struktur sosial masyarakat. Dalam konteks desa, konflik tersebut bersifat horizontal karena melibatkan warga yang memiliki kedudukan sosial relatif setara, sehingga dampaknya langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif teori interaksi sosial, perubahan hubungan antarwarga pasca Pilkades menunjukkan bahwa interaksi sosial bersifat dinamis dan kontekstual. Interaksi yang sebelumnya harmonis dapat berubah menjadi renggang ketika dipengaruhi oleh kepentingan politik, namun juga dapat kembali membaik ketika terdapat mekanisme sosial yang mendukung rekonsiliasi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa struktur sosial desa tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi terhadap perubahan situasi politik dan sosial.

Peran tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga desa menjadi faktor kunci dalam proses pemulihan hubungan sosial. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator sosial yang menjembatani kelompok-kelompok yang sempat terpolarisasi. Melalui pendekatan kultural, musyawarah, dan kegiatan kolektif, konflik yang muncul dapat dikelola sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang berkepanjangan. Temuan ini sejalan dengan konsep modal sosial, di mana nilai-nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial berperan penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pilkades memiliki dampak jangka pendek dan jangka menengah terhadap interaksi sosial masyarakat. Dalam jangka pendek, Pilkades cenderung memicu ketegangan dan polarisasi sosial. Namun, dalam jangka menengah, masyarakat secara bertahap mampu melakukan penyesuaian dan rekonsiliasi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik yang muncul lebih bersifat temporer dan dapat diredam melalui pengelolaan sosial yang tepat.

Dengan demikian, Pilkades di Desa Baebunta dapat dipahami sebagai arena pembelajaran demokrasi sekaligus ujian bagi kohesi sosial masyarakat desa. Apabila dikelola secara inklusif, transparan, dan partisipatif, Pilkades berpotensi memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas interaksi sosial. Sebaliknya, tanpa upaya pengelolaan konflik dan rekonsiliasi yang memadai, Pilkades dapat meninggalkan residu konflik sosial yang menghambat pembangunan dan keharmonisan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Kepala Desa di Desa Baebunta memiliki dampak yang signifikan terhadap interaksi sosial masyarakat. Pilkades tidak hanya meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran demokrasi warga, tetapi juga memunculkan dinamika sosial berupa polarisasi dan ketegangan hubungan antarwarga akibat perbedaan pilihan politik. Meskipun demikian, konflik sosial yang muncul bersifat sementara dan cenderung mereda seiring dengan berjalannya waktu melalui proses adaptasi dan rekonsiliasi sosial. Peran tokoh masyarakat, aparat desa, serta kegiatan kolektif

desa terbukti penting dalam memulihkan keharmonisan sosial, sehingga Pilkades dapat dipahami sebagai proses demokrasi lokal yang sekaligus menjadi sarana pembelajaran sosial bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1956.

Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Usman, Sunyoto. *Sosiologi: Sejarah, Teori, dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.